

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.
- Asy'ari, Hasyim. *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media. 2019.
- Gazali. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V: Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010.
- Mau, Hedwig Adianto dan Tinton Ditisrama. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*. Purwokerto: Amerta Media. 2024.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, dkk. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*. Serang: Sada Kurnia Pustaka. 2024.
- Raden, Sahran. *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*. Bogor: Divya Media Pustaka. 2025.
- Riewanto, Agus, dkk. *Hukum Tata Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2023.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Milthree Saragih, Chairul Bariah, dan Ais Surasa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Serang: Sada Kurnia Pustaka. 2023.
- Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2020.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari. *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia. 2011.

Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. *Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2023.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, diucapkan 23 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, diucapkan 26 Juni 2025.

Jurnal

Al Basith, Adam Fadillah, Rayhan Alhakim, dan Hanifah Khusnul Khatimah. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-

- XXI/2024: Reformasi Legislasi Bidang Kepemiluan di Indonesia”. *Nomokrasi*. Volume 3. Nomor 2. (2025).
- Al Maida, Sri Asriana, Rosmini, dan Ine Ventyrina. “Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah”. *Risalah Hukum*. Volume 18. Nomor 1. (2022).
- Amir, Mushaddiq. “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 23. Nomor 2. (2020).
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. “Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia”. *Khazanah Hukum*. Volume 3. Nomor 2. (2021).
- Asy’ari, Hasyim. “Menata Pembentukan Regulasi Pemilihan Umum: Tinjauan dan Prospek”. Makalah pada Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2024.
- Badri, M. Hilalatul. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemilihan Umum*. Skripsi. Universitas Jambi. 2026.
- Faiz, Pan Mohamad. “Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 3. (2017).
- Faridhi, Adrian dan Mexsasi Indra. “Dinamika Keserentakan Pemilu dan Pilkada 2024: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024”. *KNAPHTN*. Volume 3. Nomor 1. (2025).
- Hantoro, Bimo Fajar. “Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Undang: Jurnal Hukum*. Volume 6. Nomor 1. (2023).
- Kansil, Christine S. T. dan Putri Meilika Nadilatasya. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika”. *Unes Law Review*. Volume 6. Nomor 4. (2024).
- Khanifah, Anidaul dan Shanita Nuraini Thaqwim. “Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif Radbruch: Tegangan antara Keadilan dan Legalitas”. *Jurnal Perspektif Hukum*. Volume 6. Nomor 2. (2026).
- Patra, Rommy. “Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Volume 8. Nomor 2. (2022).

- Rasji, Benedict Artika Sari dan Elissa Virginia. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Kontribusi Judicial Review terhadap Reformasi Pemilu”. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Volume 4. Nomor 3. (2024).
- Ropii, Imam dan Ariska Cesar Divian Candra Kusuma. “Penataan Pemilu Nasional dan Daerah: Rekayasa dan Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024”. *KNAPHTN*. Volume 3. Nomor 1. (2025).
- Ru’ati, Amien, Garciano Nirahua, dan Ronny Soplantila. “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat di Indonesia”. *Pattimura Legal Journal*. Volume 1. Nomor 1. (2022).
- Safitri, Melani dan Arif Wibowo. “Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume 2. Nomor 1. (2023).
- Salam, Shelli Nur dan Kurniasih. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif”. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Volume 3. Nomor 1. (2025).
- Silalahi, Wilma. “Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung”. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Volume 5. Nomor 1. (2023).
- Sipayung, Jesica Ira Putri dan Hisar Siregar. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Pemilihan Serentak di Indonesia”. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*. Volume 2. Nomor 2. (2023).
- Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 17. Nomor 2. (2020).
- Sukmawan, Yulia Audina dan Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum”. *Notary Law Journal*. Volume 4. Nomor 3. (2025).
- Supandri, Ian dan Reijeng Tabara. “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review”. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 5. Nomor 1. (2023).
- Suryana, Eka Pala, Adhitya Widya Kartika, dan Abdullah Fikri. “Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal”. *Jurnal Hukum Legalita*. Volume 7. Nomor 2. (2025).

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya dan Luthfi Hafidz Rafsanjani. "Menata Ulang Sistem Kepemiluan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024". *KNAPHTN*. Volume 3. Nomor 1. (2025).

Zainuddin, Muhammad dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum". *Smart Law Journal*. Volume 2. Nomor 2. (2023).

Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Dari Serentak ke Terpisah: Tafsir Baru Mahkamah Konstitusi atas Model Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia". rechtsvinding.bphn.go.id. 2025.

Badan Pusat Statistik. "[Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi". [bps.go.id. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html). diakses 3 September 2026.

Hukumonline. "Begini Tiga Opsi Pemilu Baru Sesuai Putusan MK". hukumonline.com. Maret 12. 2026.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap. "MK Ketuk Palu: Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Diselenggarakan Terpisah Mulai 2029". kpu.go.id. 2025.